IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM PROGRAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN PINANG

Oleh:
Fera Anggrainy

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang adanya semakin banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima yang menempati kawasan Taman Pinang sehingga memunculkan banyak permasalahan yang membuat Pemerintah setempat harus mengaturnya. Dalam Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pemerintah memiliki peraturan yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam program relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Taman Pinang. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni: Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Taman Pinang dan bagaimana dampak implementasi kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima dan warga Taman Pinang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan model Snowball dengan menggunakan *Key Informan* (menunjuk salah satu informan yang basiknya faham dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti). Hal ini bertujuan untuk memberikan kelengkapan data secara luas dan mendalam sekaligus memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini atau dengan kata lain untuk memperluas subjek penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam program relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Taman Pinang belum terimplementasi karena lokasi Kawasan Taman Pinang sebagai lahan berjualan para PKL masih illegal sehingga pemerintah Sidoarjo tidak dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dan pemerintah mencari solusi dengan mendapatkan lokasi yang sesuai dan segera merelokasi para PKL tersebut dari kawasan Taman Pinang. Implementasi kebijakan tersebut memberikan hasil yang positif terhadap pedagang kaki lima karena Pemerintahan telah mengatur PKL dan bersikap transparan sedangkan hasil dari implementasi kebijakan tersebut terhadap warga Taman Pinang ada dua yaitu hasil yang positif seperti kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, harga terjangkau, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan hasil negatifnya adalah dari segi tatanan tempat yang menjadi tidak teratur dan kebersihan yang terganggu.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id